



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



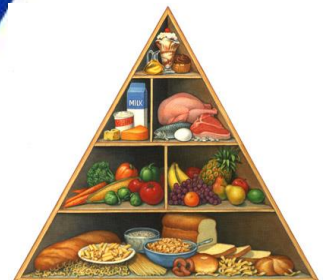
Feed Indonesia
Feed The World



Ketersediaan

Akses

Stabilitas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2021. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 5 (lima) Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2021. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2021 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 96,93% (Sangat baik).

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	3
1.5 Sumber Daya Manusia	4
1.6 Sistematika Penyajian	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 7
2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026	7
2.2 Visi dan Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran	8
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021	8
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2 Realisasi Anggaran	17
 BAB IV PENUTUP	 24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Strategi Pemecahan Masalah	24

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan Pangan sangat penting bagi pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional dan eksistensi kedaulatan bangsa, Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2021, perlu mempertimbangkan : (1) Keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsitusi kelembagaan dalam Mendorong peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) Sinergitas antar program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) Sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Penyempurnaan Sistem Instansi Pemerintah (good governance) dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan dengan kemampuan sendiri oleh masing- masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang mengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal.

Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu eselon II pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan pengukuran kinerja, maka Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub bagian yaitu:
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Seksi Ketersediaan Pangan;
 - Seksi Akses Pangan;
 - Seksi Kerawanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Seksi Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga Pangan;
 - Seksi Cadangan Pangan.
 3. Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Panganekaragaman Pangan;
 - Seksi Keamanan Pangan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan:

- Analis Ketahanan Pangan;
- Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- Analis Pasar Hasil Pertanian;
- Jabatan fungsional lainnya

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan

Landasan hukum pembentukan instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tanggal 31 Desember 2021.

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari	Keadaan 31 Desember
S3	-	-
S2	2	5
S1	36	25
DIII	5	2
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	12	7
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	56	40

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
IV	5	8
III	11	10
II	-	1
I	-	-
PTT	2	2
THL	38	19
Jumlah	56	40

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pangan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tersebut, diidentifikasi permasalahan ketahanan pangan yang saat ini dihadapi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
2. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi bencana yang tidak terduga memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik
3. Rendahnya dalam kemampuan mengakses pangan
4. Belum maksimalnya dalam kelancaran distribusi dan akses pangan
5. Belum terjaminnya stabilitas harga pangan
6. Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal.
7. Rendahnya status gizi masyarakat
8. Rendahnya mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, latar belakang, maksud dan tujuan, serta gambaran, Aspek strategis Organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun n
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1 serta beberapa tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dan langkah-langkah atau saran-saran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.2 Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Agamais, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dinas ketahanan pangan berperan dalam mewujudkan misi ke tiga Bupati, Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dengan tujuan peningkatan kedaulatan pangan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Secara umum Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah “Peningkatan Kedaulatan Pangan”. Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan;
3. Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut : Indikator kinerja tujuan :

1. Indek Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator kinerja sasaran :

1. Ketersediaan Pangan Utama (%);
2. Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis (Gapoktan/Poktan);
3. Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita/hari (%);
4. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan ;
5. Skor pola pangan harapan (PPH).

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman

Barat Tahun 2021. Pada Tabel 3 akan disajikan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase terlaksananya Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	100%
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%
3.	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100%
4.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pelaksanaan program Pengawasan Keamanan Pangan	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1. Peningkatan nilai SAKIP 2. Level maturitas OPD 3. Opini terhadap laporan keuangan	1. BB 2. 3 3. WTP

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021. Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis terhadap 5 (lima) sasaran 30 (tiga puluh) indikator kinerja sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

3.1.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	85 % - 100%	Sangat baik
2	75 % - 84 %	Baik
3	56 % - 74 %	Cukup
4	<55 %	Kurang

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian target 30 (tiga puluh) sub kegiatan indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan lumbung pangan masyarakat 1.1 Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	1 paket	1 paket	100 %

	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>Ketersediaan energi protein perkapita per tahun dan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi</p> <p>2.1 Jumlah dokumen neraca bahan makanan</p> <p>2.2 Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok dan pasokan harga pangan</p> <p>2.3 Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten dan kota</p> <p>2.4 Jumlah dokumen konsumsi pangan</p> <p>2.5 Jumlah KWT yang fasilitas dan dibina</p> <p>2.6 Jumlah kooordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan</p>	<p>1 dokumen</p> <p>11 kecamatan</p> <p>23 ton</p> <p>1 dokumen</p> <p>12 KWT</p> <p>20 kali</p>	<p>1 dokumen</p> <p>11 kecamatan</p> <p>0 ton</p> <p>1 dokumen</p> <p>12 KWT</p> <p>20 kali</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>65 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
3	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	<p>Persentase program penanganan kerawanan pangan</p> <p>3.1 Jumlah data dasar penyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>100 %</p>

		3.2 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 kali	20 kali	100 %
4	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pelaksanaan program Pengawasan Keamanan Pangan 4.1 Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	3 kelompok	3 kelompok	100 %
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Cakupan pelayanan urusan pemerintahan daerah 5.1 Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun 5.2 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun 5.3 Jumlah PNS penerima gaji dan tunjangan 5.4 Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang adm perkantoran 5.5 Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan 5.6 Jumlah non PNS (THL) yang	7 dokumen 2 dokumen 16 PNS 2 PTT dan 12 THL 7 PNS 2 THL	7 dokumen 2 dokumen 19 PNS 2 PTT dan 10 THL 7 PNS 2 THL	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

		melaksanakan pengaman BMD pada Dinas Ketahanan Pangan			
	5.7	Jumlah ASN penatausahaan BMD	1 PNS	1 PNS	100 %
	5.8	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dandiklat kepemimpinan	3 ASN	0 ASN	65 %
	5.9	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	1 paket	100 %
	5.10	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	100 %
	5.11	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	100 %
	5.12	Jumlah blangko, SPT, SPPD, Kuitansi dan map dinas ketahanan pangan yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	100 %
	5.13	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	12 bulan	12 bulan	100 %
	5.14	Jumlah pengadaan peralatan elektronik	4 unit	4 unit	100 %

		penunjang operasional kantor			
		5.15 Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air	12 bulan	12 bulan	100 %
		5.16 Jumlah non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 THL	2 THL	100 %
		5.17 Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	21 unit	21 unit	100 %
		5.18 Jumlah alat elektronik penunjang operasional adm perkantoran yang dipelihara	10 unit	10 unit	100 %
		5.19 Jumlah gedung atau bangunan kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	100 %

Dari Tabel 5. dapat dilihat, rata-rata capaian pencapaian target 30 (tiga puluh) sub kegiatan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian 5 (Lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah dengan capaian rata-rata 100%. Tingkat capaian terendah adalah sebesar 65 % yaitu indikator kinerja jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota dan Pendidikan dan pelatihan pegawai, target yang tidak tercapai ini disebabkan karena pengurangan anggaran, namun untuk biaya operasional pada kedua indikator masih bisa mencapai target sesuai dengan anggaran yang tersedia. Rekapitulasi capaian kinerja 30 (tiga puluh) sub kegiatan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian indikator kinerja kategori keberhasilan

No	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	Sangat Baik	28 Indikator Kinerja
2	Baik	0 Indikator Kinerja
3	Cukup	2 Indikator Kinerja
4	Kurang	0 Indikator Kinerja
Jumlah		30 Indikator Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar **Rp. 3.770.618.166,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.655.031.020,-** atau **96.93 %** dengan rincian seperti pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2021		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pada Tahun 2021	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PANGAN			3.770.618.166		3.655.031.020		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan urusan pemerintahan daerah	100 %	2.662.351.166	100 %	2.622.421.020	100%	
<i>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	100%	28.869.750	100%	25.944.000	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 dokumen	27.269.750	7 dokumen	24.344.000	100%	89,27%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	2 dokumen	1.600.000	2 dokumen	1.600.000	100%	100%

<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	2.170.913.481	100 %	2.144.052.570	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS penerima gaji dan tunjangan	16 PNS	1.948.989.481	19 PNS	1.929.250.570	100%	98,99%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	2 PTT dan 12 THL	149.004.000	2 PTT dan 10 THL	143.894.000	100%	96,57%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 PNS	72.920.000	7 PNS	70.908.000	100%	97,24%
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	356 Unit	44.648.000	370 Unit	44.648.000	100%	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengaman BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	2 THL	35.048.000	2 THL	35.048.000	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah ASN penatausahaan BMD	1 PNS	9.600.000	1 PNS	9.600.000	100%	100%
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	1.650.000	100 %	1.650.000	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan	3 ASN	1.650.000	0 ASN	1.650.000	65 %	100%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	100%	198.403.200	100%	191.285.550	100%	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	2.780.300	1 paket	2.775.000	100%	99,81%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	32.064.800	1 paket	31.962.500	100%	99,68%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	3.614.850	1 paket	3.604.000	100%	99,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blangko, SPT, SPPD, Kuitansi dan Map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	12 Bulan	27.507.250	12 Bulan	27.507.250	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	132.436.000	12 Bulan	125.436.800	100%	94,72%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	35.362.750	4 Unit	35.025.800	100%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	1 Scanner dan 3 Laptop	35.362.750	1 Scanner dan 3 Laptop	35.025.800	100%	99,05%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	78.732.985	100%	76.118.050	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk	12 Bulan	56.632.985	12 Bulan	54.018.050	100%	95,38%

	operasional kantor						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 THL	22.100.000	2 THL	22.100.000	100%	100%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemeliharaan BMD di Dinas Ketahanan Pangan	100%	103.771.000	100%	103.697.050	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	21 unit	57.800.000	21 unit	57.765.300	100%	99,94%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional adm perkantoran yang dipelihara	10 unit	33.971.000	10 unit	33.931.750	100%	99,88%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan kantor yang dipelihara	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% ketersediaan pangan utama		516.681.000		496.265.300		
<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM	1 Paket	516.681.000	1 Paket	496.265.300	100%	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah insfrastruktur	1 Paket	516.681.000	1 Paket	496.265.300	100%	96,05%

	lumbung pangan yang tersedia						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi protein perkapita		477.719.150		430.842.800		
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>	Data ketersediaan dan kebutuhan serta harga pangan strategis	11 keca matan	103.626.500	11 keca matan	94.999.050		
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan	1 doku men	47.927.500	1 doku men	42.309.400	100%	88,28%
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok dan pasokan harga pangan	11 keca matan	33.900.000	11 keca matan	30.980.000	100%	91,39%
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			21.799.000		21.709.650	100%	99,59%
<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya pengelolaan keseimbangan cadangan pangan		55.157.700		49.815.400		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten dan kota	23 ton	55.157.700	0 ton	49.815.400	65 %	90,31%
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita per tahun		318.934.950		286.028.350		

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan	1 dokumen	34.239.950	1 dokumen	24.363.700	100%	71,16%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita tani yang difasilitasi dan dibina	12 KWT	264.050.000	12 KWT	246.943.150	100%	93,52%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	20 kali	20.645.000	20 kali	14.721.500	100%	71,31%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase program penanganan kerawanan pangan	100 %	92.752.500	100 %	86.594.850		
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	43.212.500	1 dokumen	42.648.000		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah data dasar penyusun peta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang difasilitasi	1 dokumen	43.212.500	1 dokumen	42.648.000	100%	98,69%
<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten		49.540.000		43.946.850		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 kali	49.540.000	20 kali	43.946.850	100%	88,71%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100 %	21.114.350	100 %	18.907.050		
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan</i>	terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	3 kelompok	21.114.350	3 kelompok	18.907.050		

<i>Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>							
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan fasilitasi	3 kelo mpok	21.114.350	3 kelo mpok	18.907.050	100%	89,55%

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 30 sub kegiatan dalam 15 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas, untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan kinerja sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang akan muncul adalah dengan melakukan penjadwalan dan perencanaan kegiatan yang lebih matang, terukur dan efisien serta disarankan pada pelaksana/penanggungjawab kegiatan agar lebih fokus, peduli serta meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, diperlukan strategi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Dinas Ketahanan Pangan
2. Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan secara bertahap
3. Memperkuat struktur organisasi
4. Meningkatkan dukungan anggaran biaya pembangunan
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat di buat untuk pedoman selanjutnya.

Sukamenanti, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman barat

